

**KINERJA DINAS TRANSMIGRASI TENAGA KERJA DAN KOPERASI UKM DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KABUPATEN
GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Markopolo
NPP. 30.0923

Asdaf Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: markopolo18200@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Tjahya Supriatna, S.U

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the condition of job duties at the Office of Transmigration, Labor, and UKM cooperatives of Gunung Mas Regency is still not in accordance with Gunung Mas Regent Regulation No. 52 of 2019. **Purpose:** The purpose of this study is to determine and analyze how the performance of the state civil apparatus, the obstacles faced, and what efforts to overcome obstacles in empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) of Gunung Mas Regency. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** The performance of the Office of Labor Transmigration and SME Cooperatives in empowering MSMEs in Gunung Mas Regency in carrying out its duties and functions has not been optimal. Due to the lack of quality of the apparatus, limited funds and infrastructure facilities owned by the Office of Labor Transmigration and SME Cooperatives in the Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) of Gunung Mas Regency, Central Kalimantan Province. **Conclusion:** The performance of the Gunung Mas Regency Cooperative and Transmigration Office in empowering small and medium enterprises (SMEs) is quite optimal in the indicators of Goals, Standards, Motives and Opportunities but is still lacking in the indicators of Tools and Facilities, Feedback and Employee Competence this is indicated by the limited capital, complaints submitted by the community and the lack of quality of employees as a result of observations that the author found then of the seven elements of empowerment only one has not been achieved, namely funding. **Keywords:** State Civil Apparatus, Performance, Empowerment, Micro, Small and Medium Enterprises

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang kondisi tugas jabatan pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas masih tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Gunung Mas No 52 Tahun 2019 **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja aparatur sipil negara, kendala yang dihadapi, serta upaya apa saja untuk mengatasi kendala dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Gunung Mas. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah

penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** kinerja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Koperasi UKM dalam pemberdayaan UMKM Kabupaten Gunung Mas dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum optimal. Karena kurangnya kualitas aparatur, keterbatasan dana dan sarana infrastruktur yang dimiliki Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Koperasi UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. **Kesimpulan:** Kinerja Dinas Koperasi dan Transmigrasi Kabupaten Gunung-Mas dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) cukup optimal pada indikator Tujuan, Standar, Motif dan Peluang akan tetapi masih kurang di indikator Alat dan Sarana, Umpan Balik serta Kompetensi Pegawai hal ini ditunjukkan dari keterbatasan modal, keluhan yang disampaikan masyarakat dan kurang kualitas pegawai hasil dari observasi yang penulis temukan kemudian dari ketujuh unsur pemberdayaan hanya satu yang belum tercapai yaitu pendanaan.

Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, Kinerja, Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia, pemerintah pusat telah memberikan hak dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membangun, mendukung, dan mengembangkan potensi yang ada pada daerah daerah masing - masing. Otonomi daerah merupakan wujud dari adanya semangat dalam menciptakan pemerintahan daerah yang mandiri, berkualitas, serta mampu membangun dan meningkatkan perekonomian nasional melalui pemberian hak dan wewenang kepada daerah untuk pembangunan daerah. Artinya kewajiban bagi pemerintah tidak semata - mata melaksanakan tugas di bidang pemerintahan saja, tetapi juga melaksanakan kesejahteraan sosial atau untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, melalui pembangunan nasional. pemerintah diharapkan mampu memenuhi tujuan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sudaryanto (2011), menunjukkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan di pemerintahan, pembangunan nasional Indonesia didampingi oleh pengelola keuangan yang mahir dalam administrasi. Ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan nasional. Pernyataan itu relevan dengan pengertian otonomi daerah yang terkandung dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 ayat 1 pasal 6 yang isinya otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya kebijakan ini pemerintah daerah dituntut untuk bekerja lebih kreatif dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terdapat di daerah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah terkait pemberdayaan yaitu upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha mikro kecil menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Namun dalam prosesnya usaha mikro kecil menengah di indonesia menghadapi berbagai masalah seperti dalam proses produksi dimana di pengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia , modal, teknologi serta dalam masalah pemasaran. Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah harus lebih di arahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. seperti yang dikatakan beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun masyarakat memberdayakan

rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Masih dalam buku tersebut, Person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta Lembaga - lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Disadari pula bahwa, pengembangan usaha mikro kecil menengah menghadapi berbagai kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tolok ukur perkembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk bekerja lebih maksimal dan kreatif dalam menjalankan tugasnya di bidang UMKM, dengan begitu banyaknya permasalahan-permasalahan yang terdapat di lapangan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu mengembangkan berbagai inovasi dalam bekerja agar dapat mewujudkan pemberdayaan dan pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang maksimal. Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang peduli terhadap perkembangan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebagai salah satu institusi pemerintahan daerah di Kabupaten Gunung Mas, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM mempunyai tugas sekaligus wewenang untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Gunung Mas, salah satunya dengan melakukan inovasi dan upaya pengembangan dan pemberdayaan pada pelaku usaha mikro kecil menengah melalui pelatihan di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan institusi pemerintahan daerah di Kabupaten Gunung Mas, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas sekaligus wewenang untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Gunung Mas, salah satunya dengan melakukan inovasi dan upaya pengembangan dan pemberdayaan pada pelaku usaha mikro kecil menengah melalui pelatihan di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunung Mas No 52 Tahun 2019 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas khususnya tugas pokok dan fungsi bidang usaha mikro kecil menengah yaitu menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis di bidang pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, serta pembinaan fasilitasi bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan koperasi usaha kecil dan menengah. Namun kondisi saat ini Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas masih tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Gunung Mas No 52 Tahun 2019 dapat dilihat dari Tabel perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun 2021 sampai dengan 2023.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam penilaian peran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Penelitian oleh Rika Rahayu (2018) dengan judul Peran Dinas Perindustria, Perdagangan Dan Koperasi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Kabupaten Bungo, menemukan hasil bahwa Peran Dinas Perindustrian Daerah Kabupaten Bungo efektif dalam memperkuat kemampuan dan pengetahuan masyarakatnya agar mampu memahami situasi kondisi perekonomian demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat lebih mandiri dan mampu bertahan menghadapi kondisi dan perdagangan mandiri dan berkualitas. Penelitian oleh Amirul Arief Fatony (2015-2016) dengan judul Peran Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Menengah, Dan Perindustrian Kabupaten Bantul Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Tahun (Studi Kasus Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, menemukan hasil bahwa Dalam upaya pelaksanaan pemberdayaan UMKM, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul telah terlaksana dengan baik program program yang dibuat untuk meningkatkan dan memajukan dan pemberdayaan UMKM berjalan dengan baik.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada peran Dinas terkait dalam pemberdayaan UMKM. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Rika Rahayu tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Kinerja dari Hersey, Blanchard, dan Johnson dalam Wibowo (2017). Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan manajemen pemerintahan yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk Untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kinerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisis hambatan kinerja pegawai Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisis upaya mengatasi hambatan kinerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi kinerja dinas transmigrasi tenaga kerja dan koperasi UKM dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan serta pembinaan UMKM.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 6 orang yang diambil dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi UKM

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

menggunakan teori Kinerja dari Hersey, Blanchard, dan Johnson dalam Wibowo (2017) dijelaskan Indikator kinerja dipakai untuk aktivitas yang hanya dapat di tetapkan secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati. Teori ini didukung dengan enam variable yang menjadi pusat perhatian yaitu Standar, umpan balik, alat dan sraana, kompetensi, motif, dan peluang. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Standar

Definisi standar adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tujuan dapat dicapai dan terkandung dalam salah satu indikator kinerja tersebut. Akibatnya, standar yang dimaksud berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah suatu kinerja berhasil atau tidak. Kinerja dianggap berhasil ketika memenuhi tujuan sebelumnya yang ditetapkan oleh atasan dan bawahan. Penulis mengambil kesimpulan dimensi standar dan unsur penciptaan iklim organisasi dalam pemberdayaan UMKM sudah berjalan dengan baik dengan standar kinerja yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas serta iklim-organisasi yang baik ditunjukkan oleh dinas.

3.2. Umpan Balik

Saat mengevaluasi kemajuan menuju tujuan, standar kerja, dan standar kinerja, umpan balik diperlukan sebagai masukan. Evaluasi kinerja biasanya dilakukan melalui umpan balik untuk meningkatkan kualitas kinerja berikutnya. Baik faktor internal maupun eksternal berkontribusi pada proses umpan balik. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan UMKM telah disediakan dan diprogramkan fasilitas berupa wadah atau lokasi program pelatihan bagi pelaku UMKM sehingga umpan balik sangat mungkin diperoleh karena masyarakat dan lingkungan yang merupakan tempat tinggal masyarakat, adalah objek dan subjek yang dilayani. Padahal, masyarakat harus lebih terlibat dan serius dalam mengembangkan perusahaannya. Masyarakat pada umumnya hanya memahami bahwa setiap program yang dibuat oleh Pemerintah yang menjadi tanggung jawab Aparatur dan tidak peduli hal tersebut, yang mengakibatkan dituntut mengambil peran yang penting yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara Aparatur dan masyarakat dengan demikian agar dapat terciptanya kerjasama dan komunikasi yang optimal. Karena banyak orang memiliki pendapat negatif tentang layanan yang diberikan kepada organisasi publik, maka kualitas layanan menjadi salah satu indikatornya. Indikator ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan bisa berupa kepuasan masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan ukuran seberapa baik birokrasi publik menjalankan tugasnya. Manfaat mendasar dari pelibatan pemenuhan kawasan lokal sebagai pointer pameran adalah bahwa data pemenuhan kawasan lokal dapat diakses secara efektif dan murah. Media dan diskusi publik memberikan informasi mengenai kepuasan masyarakat. Standar kinerja dan capaian Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi UMK digunakan untuk mengevaluasi dimensi umpan balik ini.

3.3. Alat dan Sarana

Dalam menyelesaikan tugas atau hasil kerja yang efektif dan efisien serta tidak menghambat kegiatan organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya. Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Koperasi UMKM membutuhkan dukungan, baik di dalam tempat kerja maupun di luar lapangan. Peralatan yang dikenal sebagai alat dan fasilitas dapat mendukung operasi yang dilakukan dan membantu penyelesaian tugas dengan sukses. Infrastruktur atau alat akan berdampak langsung pada kinerja. Produk persediaan adalah barang dagangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam suatu organisasi yang digunakan selama lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftarkan dalam buku persediaan. Sebagai salah satu organisasi yang sehari-hari memberikan pelayanan, Dinas Koperasi dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti terlihat pada tabel di atas. Namun, barang-barang dari inventaris tersebut masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan.

3.4. Kompetensi

Untuk dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sebuah organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Arti dari kemampuan itu sendiri adalah bahwa sebagai perangkat harus menawarkan jenis bantuan yang sesuai mengingat informasi, kemampuan, keterampilan, sesuai kebutuhan yang mungkin muncul. Kompetensi seseorang adalah kapasitas mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kompetensi mempengaruhi kualitas kinerja seseorang. Kualitas kinerja seorang pegawai juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Kinerja dipengaruhi oleh integritas, semakin tinggi pendidikan maka semakin baik kinerjanya. Dalam hal ini terlihat dari kompetensi pegawai yang sudah mampu menjalankan tugas tupoksinya. Hal ini dikarenakan banyaknya pegawai yang sedang menempuh pendidikan Sarjana, yang berdampak pada kompetensi diri mereka sendiri. Karena mereka harus memastikan bahwa setiap tugas yang dilakukan oleh bawahannya berjalan sesuai rencana, pemimpin membutuhkan energi tambahan. Karyawan diharuskan sesuai dengan standar yang ada jika kita menemukan bahwa masalah yang ada tidak dapat diselesaikan.

3.5. Motif

Motivasi dan alasan yang memotivasi pekerja untuk melakukan pekerjaannya adalah yang menentukan seberapa banyak pekerjaan yang mereka lakukan. Inilah alasan paling mendasar karyawan harus bekerja. Setiap pegawai memiliki kemampuan bekerja yang memadai secara khusus pihak kedinasan tidak memberikan bonus atau sebuah janji kepada para pegawai dalam bekerja hanya menyampaikan berkerja lah dengan baik karena sudah menjadi tanggung jawab, namun dalam hasil pekerjaan yang baik pimpinan biasanya tetap memberikan apresiasi dengan ucapan terimakasih karena untuk reward yang lain dinas masih belum bisa memberikan itu

3.6. Peluang

Peluang yang diterima Aparatur dari atasan yang mengakui prestasi kerjanya dirujuk dalam indikator kinerja akhir adalah. Temuan-temuan observasi yang peneliti lakukan, serta kesempatan yang diberikan oleh aparatur, memungkinkan mereka untuk memberikan saran atau saran kepada pimpinan namun tidak mengevaluasi pimpinan untuk mengefektifkan tugas pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunung Mas No 52 Tahun 2019 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas khususnya tugas pokok dan fungsi bidang usaha mikro kecil menengah yaitu menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis di bidang pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, serta pembinaan fasilitasi bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan koperasi usaha kecil dan menengah. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Gunung Mas masih belum berkembang dengan baik, dari tahun 2022 sampai dengan 2023 tidak ada perkembangan sama sekali di bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) setiap Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas.

Berbeda dengan hasil temuan dua penelitian terdahulu yaitu Rika Rahayu (2018) dan Amirul Arief Fatony (2015-2016) terdapat perbedaan hasil penelitian yang penulis temukan dimana hasil temuan yang penelitian terdahulu lakukan menunjukkan peran pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan dengan efektif sedangkan hasil temuan yang dilakukan oleh penulis menunjukkan kinerja Dinas Transmigrasi tenaga Kerja dan koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas itu belum efektif karena ada beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi terlaksananya pemberdayaan

UMKM yaitu dana, infrastruktur, dan kualitas ASN

Untuk standar kinerja pegawai pada Dinas Transmigrasi tenaga Kerja dan koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas itu sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2008, dan para pegawai bekerja sesuai dengan tupoksi masing masing. pelayanan dan unsur pembinaan terhadap para pelaku UMKM sudah berjalan dengan baik akan tetapi ada beberapa keluhan dari masyarakat yang harus ditanggapi oleh Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Koperasi UMKM, masyarakat perlu masakan khas yang dimiliki oleh daerah Kalimantan sendiri. unsur pendanaan serta sumber daya berupa sarana dan prasarana belum tercukupi ini menjadi tugas yang serius bagi dinas untuk memaksimalkan dana yang ada serta keterbatasan yang dimiliki dinas untuk menciptakan pelayanan yang maksimal dan pemberdayaan terhadap para pelaku UMKM. Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi UMKM Kabupaten Gunung Mas berperan penting dalam memberikan masukan dan saran yang sangat berharga kepada Pimpinan dalam rangka memberikan inovasi yang meningkatkan kinerja aparatur Dinas Tenaga Kerja. Usaha UMKM dan Koperasi di Kabupaten Gunung Mas dalam pendekatan pemberdayaan UMKM.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pemberdayaan dan pembinaan UMKM adalah hanya beberapa pegawai saja yang pernah mengikuti diklat. Dengan demikian masih banyak pegawai yang kompetensinya masih kurang. Hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja ASN dalam upaya pemberdayaan dan pembinaan UMKM masih belum berjalan secara maksimal

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja Dinas Koperasi dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) cukup optimal pada indikator Tujuan, Standar, Motif dan Peluang akan tetapi masih kurang di indikator Alat dan Sarana, Umpan Balik serta Kompetensi Pegawai hal ini ditunjukkan dari keterbatasan modal, keluhan yang disampaikan masyarakat dan kurang kualitas pegawai hasil dari observasi yang penulis temukan kemudian dari ketujuh unsur pemberdayaan hanya satu yang belum tercapai yaitu pendanaan.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penulis sehingga penulis belum bisa melakukan penelitian dengan hasil data dan informasi yang lengkap dan akurat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Gunung Mas, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudaryanto, Ragimun. 2011. *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat
- Sudaryanto, Ragimun. 2011. *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat
- Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amirul Arif Fatony. 2015-2016. *Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dan Perindustrian Kabupaten Bantul Dalam Pemberdayaan an Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) (Studi Kasus Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bungo)*: Skripsi universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Rika Rahayu. 2020. *Peran Dinas Perindustria, Perdagangan Dan Koperasi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bungo*: Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri

